

SKRIPSI

**KEKOSONGAN HUKUM (*RECHTSVACUUM*) DARI TIDAK
DILAKSANAKANNYA DELEGASI PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DELEGASI DALAM UNDANG-
UNDANG YANG DIBENTUK RENTANG TAHUN 2012-2023)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:
AFDHAL FADHILA

2010112064

PROGRAM KEKUHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Delfina Gusman, S.H., M.H.

Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**KEKOSONGAN HUKUM (*RECHTSVACUUM*) DARI TIDAK
DILAKSANAKANNYA DELEGASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
(STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DELEGASI DALAM UNDANG-UNDANG
YANG DIBENTUK RENTANG TAHUN 2012-2023)**

*(Afdhal Fadhila, 2010112064, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 230 Halaman, 2024)*

ABSTRAK

Seiring dengan begitu kompleks dan dinamisnya perkembangan masyarakat, ditambah dengan keterbatasan pembentuk undang-undang. Maka kehadiran peraturan delegasi (*delegated legislation*) menjadi keniscayaan, khususnya untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif sebagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Namun pada perkembangannya terdapat permasalahan dalam pembentukan peraturan delegasi, seperti keterlambatan bahkan tidak ditindaklanjuti pembentukan peraturan perundang-undangan setelah didelegasikan. Penelitian skripsi ini mengusung dua permasalahan: *Pertama*, bagaimana praktik pendelegasian peraturan pelaksanaan dalam undang-undang rentang tahun 2012-2023. *Kedua*, Bagaimana implikasi dan mekanisme yang dapat dilakukan terhadap peraturan delegasi yang belum ditindaklanjuti oleh delegataris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menjadikan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai pendekatan paling utama dalam mengurai permasalahan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan, bahwa dalam kurun tahun 2012-2023 terdapat 254 undang-undang yang telah disahkan dengan 136 undang-undang diantaranya memuat pendelegasian. Setidaknya ditemukan sebanyak 3.698 jumlah delegasi yang ditujukan pada berbagai jenis peraturan perundang-undangan, dari angka tersebut masih terdapat 1.166 delegasi yang tidak/belum ditindaklanjuti dan 507 delegasi terlambat dalam pelaksanaannya. Kemudian juga ditemukan praktik-praktik anomali yang tidak sejalan dengan UU PPP. Tidak/belum dilaksanakannya pembentukan peraturan delegasi berimplikasi pada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga tidak akan pernah maksimal fungsi atau tujuan dari suatu undang-undang dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang atau diskresi. Tersedia tiga mekanisme yang dapat digunakan untuk menanggulangi hal tersebut. *Pertama*, memaksimalkan pemantauan dan peninjauan undang-undang yang merupakan bagian dari bentuk fungsi pengawasan DPR. *Kedua*, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada PTUN. *Ketiga*, memberlakukan peraturan pelaksanaan atau peraturan delegasi dari undang-undang yang telah dicabut sebagai solusi sementara untuk menghindari kekosongan hukum. Adapun saran yang patut untuk dipertimbangkan diantaranya: *Pertama*, delegataris semestinya menindaklanjuti delegasi yang telah diberikan, khususnya terhadap undang-undang yang masih berlaku. *Kedua*, perlu untuk melakukan revisi UU PPP, dengan memberikan kedudukan yang lebih jelas atas eksistensi peraturan delegasi di Indonesia. *Ketiga*, memaksimalkan semua mekanisme yang tersedia bilamana pembentukan peraturan delegasi tak kunjung ditindaklanjuti.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Delegasi

**LEGAL VACUUM (*RECHTSVACUUM*) FROM THE NON-IMPLEMENTATION
OF DELEGATION OF THE FORMATION OF LAWS AND REGULATIONS
(STUDY ON THE FORMATION OF DELEGATED LEGISLATIONS IN LAWS
FORMED BETWEEN 2012-2023)**

(Afdhal Fadhila, 2010112064, Concentration Program Constitutional Law (CP V), Faculty of
Law, Andalas University, 230 pages, 2024)

ABSTRACT

In conjunction with the intricate and evolving social structure, there are inherent constraints imposed by the legislative process. Therefore, the existence of delegated legislation is imperative, particularly for the regulation of administrative and technical matters as an implementing regulation of a law. However, the process of developing delegated legislations is not without its challenges. One such challenge is the potential for delays or a lack of follow-up in the formation of laws and regulations after they have been delegated. This thesis research is concerned with two issues. Firstly, this thesis will examine the practice of delegating implementing regulations in the 2012-2023 legislative period. Secondly, what implications and mechanisms can be employed to address instances where delegated legislations have not been followed up by the delegatee? In order to address these issues, the author employs a normative juridical research approach, utilising the statute approach as the primary methodology for analysing the subject matter. The research findings indicate that during the period between 2012 and 2023, a total of 254 laws were enacted, of which 136 included some form of delegation. A total of at least 3,698 delegations were identified, pertaining to various types of laws and regulations. Of these, 1,166 were not followed up, and 507 were implemented late. Furthermore, anomalous practices that are not in accordance with the PPP Law were identified. The failure to implement delegated legislations has implications for the creation of a legal vacuum, whereby the function or purpose of a law will never be fully realised and there is a potential for abuse of authority or discretion. Three mechanisms may be employed to address this issue. Initially, the monitoring and review of legislation, as part of the DPR supervisory role, should be enhanced. Secondly, legal action may be initiated against the government for unlawful acts (*onrechtmatige overheidsdaad*) at the Administrative Court. Thirdly, implementing or delegated legislations may be enacted for the revoked legislation as a provisional measure to prevent a legal vacuum. It is recommended that the following suggestions be considered: Firstly, the delegate should ensure that the delegation given is followed up on, particularly in relation to laws that are still in force. Secondly, it is necessary to revise the PPP Law in order to provide a clearer position on the existence of delegation regulations in Indonesia. Thirdly, all available mechanisms should be utilised if the formation of delegation regulations is not followed up on.

Keywords: Legal Vacuum, Laws and Regulations, Delegated Legislation.